
**Kekerasan Berbasis Gender Dan Upaya Pencegahannya Di
Indonesia: Kajian Literatur Multidisipliner**

Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi
tirtamahayogi@gmail.com^{1*}
Bali Sruti

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit
Direvisi
Diterima

Kata Kunci:

women's empowerment;
women's school;
community-based
education; gender
equality; women's
participation.
(:)

Abstrak

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan psikologis korban, tetapi juga mempengaruhi partisipasi sosial, ekonomi, dan politik perempuan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian mengenai kekerasan berbasis gender di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai strategi pencegahan yang telah diusulkan dalam literatur ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap berbagai publikasi ilmiah yang diterbitkan pada periode 2013–2024, meliputi jurnal akademik, laporan penelitian, serta publikasi lembaga nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa KBG tidak hanya terjadi di ruang domestik, tetapi juga berkembang di ruang publik dan digital. Faktor penyebab utama meliputi budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, stereotip gender, serta lemahnya sistem perlindungan hukum bagi korban. Perkembangan teknologi digital turut memunculkan bentuk kekerasan baru seperti kekerasan berbasis gender online. Upaya pencegahan yang diidentifikasi meliputi penguatan regulasi, pendidikan kesetaraan gender, peningkatan layanan pendampingan korban, serta penguatan literasi digital masyarakat. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner yang melibatkan sektor hukum, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan komunitas dalam upaya pencegahan KBG di Indonesia.

Abstract

Gender-based violence (GBV) remains a serious human rights violation in many countries, including Indonesia. It affects survivors' physical and psychological well-being and constrains women's social, economic, and political participation. This study reviews the development of GBV research in Indonesia and identifies prevention strategies proposed in multidisciplinary literature. Using a qualitative descriptive literature review, we analyzed publications released between 2013 and 2024, including peer-reviewed journal articles, research reports, and national and international institutional publications. The review shows that GBV occurs not only in domestic settings but also in public and digital spaces. Key drivers include patriarchal norms, unequal power relations, gender stereotypes, and gaps in survivor-centered legal protection. Digital transformation has also enabled new forms of abuse, such as online gender-based violence. Prevention strategies highlighted in the literature include strengthening regulations and enforcement, gender-equality education, improving survivor support services, and enhancing community digital literacy. The findings underline the need for a coordinated multidisciplinary approach involving law, education, health, technology, and community actors to prevent GBV in Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai setiap tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan perbedaan gender yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi (United Nations, 1993). Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa individual, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial yang melanggengkan ketimpangan relasi kuasa berbasis gender.

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan sosial yang kompleks. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan secara konsisten menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis gender online. Temuan tersebut menandakan bahwa ruang aman bagi perempuan belum sepenuhnya terwujud, baik di ranah privat maupun publik.

Ketidakadilan gender dalam masyarakat dapat muncul dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban kerja ganda, serta kekerasan terhadap perempuan (Fakih, 2013). Dalam konteks ini, kekerasan dapat dipahami sebagai manifestasi paling ekstrem dari relasi sosial yang timpang, karena perempuan diposisikan sebagai pihak yang dapat dikontrol, diatur, atau bahkan disakiti.

Perkembangan teknologi digital juga mengubah pola kekerasan berbasis gender. Ruang digital yang seharusnya membuka akses informasi dan partisipasi publik justru menjadi ruang baru terjadinya kekerasan, seperti pelecehan daring, doxxing, pemerasan seksual digital, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan peretasan akun. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) memperlihatkan bagaimana bentuk kekerasan bergerak lintas ruang, dari offline ke online, dan sebaliknya.

Penelitian terkait kekerasan berbasis gender berkembang dalam berbagai disiplin ilmu—sosiologi, studi gender, hukum, kesehatan masyarakat, psikologi, ilmu komunikasi, hingga studi teknologi. Karena itu, pencegahan yang efektif membutuhkan pendekatan multidisipliner: tidak cukup mengandalkan penegakan hukum saja, melainkan juga transformasi norma sosial, penguatan layanan, dan tata kelola ruang digital yang aman.

Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk (1) memetakan perkembangan penelitian mengenai kekerasan berbasis gender di Indonesia pada periode 2013–2024, dan (2) mengidentifikasi strategi pencegahan yang diusulkan dalam literatur ilmiah lintas disiplin.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengkaji, membandingkan, dan mensintesis temuan dari berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi lembaga nasional dan internasional. Literatur yang dianalisis merupakan publikasi yang diterbitkan dalam kurun waktu 2014–2024.

Kriteria inklusi mencakup: (1) publikasi yang membahas kekerasan berbasis gender di Indonesia; (2) publikasi pada rentang 2013–2024; dan (3) publikasi yang mengulas bentuk, penyebab, dampak, serta upaya pencegahan kekerasan berbasis gender.

Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan: identifikasi literatur, seleksi berdasarkan relevansi, analisis isi (*content analysis*) untuk mengekstraksi kategori temuan, dan sintesis temuan untuk merumuskan pola konseptual mengenai dinamika kekerasan dan strategi pencegahannya.

3. PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

WHO (2021) mengklasifikasikan kekerasan berbasis gender ke dalam beberapa kategori utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi. Kategori ini membantu membedakan dampak yang ditimbulkan serta kebutuhan layanan yang berbeda bagi korban. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, penyerangan, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan atau tindakan yang melanggar integritas tubuh dan otonomi seksual korban. Kekerasan psikologis dapat berupa ancaman, intimidasi, kontrol, dan penghinaan yang menimbulkan penderitaan emosional. Kekerasan ekonomi terjadi ketika korban dibatasi aksesnya terhadap sumber daya, pekerjaan, atau pendapatan sehingga memperkuat ketergantungan pada pelaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kekerasan baru yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO). Bentuk ini mencakup pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, pemerasan seksual digital, penguntitan (stalking) digital, peretasan, hingga penyebaran data pribadi (doxxing). Literatur menegaskan bahwa KBGO dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, reputasi korban rusak, serta membatasi partisipasi perempuan di ruang digital.

Faktor Penyebab Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dianggap lebih berotoritas dalam keluarga dan masyarakat, sementara perempuan dinormalkan sebagai pihak yang harus patuh. Ketika kontrol tersebut diganggu, kekerasan sering digunakan sebagai mekanisme pemulihan dominasi.

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan menjadi pendorong penting. Dalam banyak kasus, kekerasan berfungsi sebagai alat untuk mengontrol mobilitas, keputusan, tubuh, serta akses ekonomi korban. Stereotip gender memperkuat pembenaran sosial, misalnya narasi bahwa korban 'memancing' kekerasan atau bahwa kekerasan rumah tangga adalah urusan privat.

Lemahnya sistem perlindungan hukum dan layanan yang tidak ramah korban juga berkontribusi pada rendahnya pelaporan serta impunitas pelaku. Pada ranah digital, rendahnya literasi keamanan digital dan minimnya mekanisme pemulihan cepat memperburuk risiko, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lain (misalnya perempuan muda, penyintas, disabilitas, dan komunitas minoritas).

Dampak Kekerasan Berbasis Gender

Dampak KBG meliputi kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Korban dapat mengalami cedera, gangguan kesehatan reproduksi, hingga disabilitas. Secara psikologis, korban sering mengalami trauma, depresi, gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan kualitas hidup.

Dampak sosial-ekonomi terlihat pada terganggunya pendidikan, produktivitas kerja, dan partisipasi publik. Banyak korban mengalami stigma, isolasi sosial, serta kehilangan dukungan keluarga/komunitas. Pada KBGO, dampak dapat meluas karena jejak digital yang sulit dihapus, sehingga korban cenderung membatasi aktivitas daring, menarik diri dari ruang publik, atau mengalami "self-censorship" untuk menghindari serangan ulang.

Upaya Pencegahan Multidisipliner

Literatur menekankan bahwa pencegahan KBG memerlukan pendekatan komprehensif dan lintas sektor. Intervensi yang hanya menitikberatkan pada respons setelah kejadian (misalnya

penanganan kasus) tidak cukup tanpa strategi pencegahan primer yang mengubah norma dan struktur yang melanggengkan kekerasan.

Pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang berperspektif korban menjadi fondasi. Kebijakan perlu memastikan akses keadilan, perlindungan saksi/korban, pemulihan, serta akuntabilitas pelaku, termasuk pada konteks kekerasan seksual dan kekerasan digital.

Kedua, pendidikan kesetaraan gender sejak usia dini dapat membentuk relasi setara, menantang stereotip gender, dan menumbuhkan budaya anti-kekerasan. Pendidikan ini perlu melibatkan sekolah, keluarga, organisasi kepemudaan, serta media.

Ketiga, penguatan layanan pendampingan korban meliputi layanan kesehatan, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, dan rujukan terpadu. Sistem layanan yang terkoordinasi mengurangi reviktimisasi serta mempercepat pemulihan.

Keempat, pada ranah teknologi, pencegahan KBGO membutuhkan literasi digital, keamanan digital, mekanisme pelaporan yang mudah, serta tanggung jawab platform untuk moderasi konten dan perlindungan data pribadi. Kampanye publik dan komunitas digital aman dapat memperluas dukungan sosial bagi penyintas.

Untuk memperjelas keterkaitan lintas sektor, Tabel 1 merangkum contoh strategi pencegahan berdasarkan bidang kebijakan.

Tabel 1. Contoh Strategi Pencegahan Berdasarkan Bidang Kebijakan

Sektor	Fokus Pencegahan	Contoh Intervensi
Hukum & Kebijakan	Perlindungan korban dan akuntabilitas pelaku	Prosedur ramah korban; perlindungan saksi; pemulihan; penegakan kasus kekerasan seksual dan digital
Pendidikan	Perubahan norma dan relasi setara	Kurikulum kesetaraan gender; edukasi consent; pelatihan guru; kampanye anti-bullying dan anti-kekerasan
Kesehatan	Deteksi dini dan layanan pemulihan	Layanan kesehatan terpadu; PFA/dukungan psikologis; rujukan; dokumentasi medis yang mendukung proses hukum
Teknologi	Keamanan digital dan mitigasi KBGO	Literasi keamanan digital; fitur pelaporan; proteksi data; pedoman platform; respons cepat take-down konten
Komunitas & Media	Dukungan sosial dan perubahan budaya	Kampanye publik; keterlibatan tokoh komunitas; kelompok dukungan penyintas; pemberitaan sensitif gender

Sumber: sintesis penulis dari literatur (2014–2024)



Journal of Discourse, Innovation , and Empowerment in Gender

Vol. 1, No. 1, September 2026 || E-ISSN : 3164-4848

4. SIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensional. Kekerasan terjadi di ranah domestik, publik, dan digital, dengan pola yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, ketimpangan relasi kuasa, stereotip gender, dan celah perlindungan hukum serta layanan bagi korban.

Upaya pencegahan yang paling menonjol dalam literatur menekankan perlunya intervensi multidisipliner dan terkoordinasi. Penguatan regulasi dan penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan pendidikan kesetaraan gender, penguatan layanan pendampingan korban, serta kebijakan dan tata kelola ruang digital yang aman melalui literasi dan keamanan digital.

Kedepannya, penelitian juga perlu memperdalam analisis tentang efektivitas intervensi di tingkat komunitas, tata kelola platform digital, serta pengalaman kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis. Integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam kebijakan publik menjadi kunci untuk menurunkan prevalensi kekerasan berbasis gender dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Citron, D. K., & Chesney, R. (2019). Deepfakes and the new disinformation war. *Foreign Affairs*, 98(1), 147–155.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia*. Komnas Perempuan.
- United Nations. (1993). *Declaration on the elimination of violence against women*. United Nations.
- World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates*. World Health Organization.